

BAB II

INDUSTRI FILM DAN PERKEMBANGAN FEMINISME DI JEPANG DAN INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kapitalisasi yang terjadi dalam industri perfilman Indonesia dan juga perkembangan feminisme yang diperjuangkan oleh perempuan di Indonesia dan juga Jepang. Bab ini akan lebih spesifik melihat isu apa saja yang menjadi perhatian gerakan feminis yang kemudian dikaitkan dengan isu yang menjadi objek penelitian. Film animasi *“The Seven Deadly Sins: Prisoners Of The Sky”* merupakan film yang mengisahkan tentang petualangan Seven Deadly Sins di Sky Temple, yang mana di dalamnya terdapat berbagai scene yang menyuguhkan *fan service* bagi para penontonnya seperti penggambaran karakter perempuan yang menonjolkan bagian tubuh tertentu untuk diobjektifikasi.

2.1. Industri Perfilman

2.1.1. Perkembangan Industri Film di Indonesia

Pada awal munculnya produksi film di Indonesia di era Belanda (1926-1942), tentu pemerintah Hindia Belanda menegakkan sensor untuk tetap mempertahankan posisi superior masyarakat Eropa di Indonesia, film-film yang masuk ke Indonesia disortir dan disensor oleh Komisi Film Hindia dengan tujuan terciptanya atmosfer perfilman yang kondusif untuk dikonsumsi para masyarakat pribumi. Film pertama yang diproduksi di Indonesia adalah *Loetoeng Kasaroeng*, yaitu pada tahun 1926 oleh sutradara Belanda, G. Krueger dan L. Heuveldrop. Lalu pada tahun 1930-an,

pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Filmordonantie Staatsblad*, yaitu hukum yang mengharuskan komisi film untuk menonton, memeriksa, dan menyetujui film yang akan dirilis pada publik.

Kemudian pada era pendudukan Jepang di tahun 1942-1945, industri film di Indonesia perkembangannya menurun secara drastis. Hal ini dikarenakan ketika masa penjajahan Jepang, kebebasan berekspresi dan seluruh jenis ekspresi politis dilarang di Indonesia. Namun dengan ini, para pembuat film di Indonesia menjadi belajar bagaimana untuk membuat film-film propaganda. Lalu industri film mulai kembali berkembang setelah Perang Dunia II, terutama untuk film lokal. Pada era Soekarno di tahun 1945-1966, hukum perfilman masa Belanda yang represif “diaktivasi” ulang, juga aturan sensor yang mengekang. Dengan adanya hukum baru, yaitu Film Establishment Act No. 1 pada tahun 1964, pemerintah Indonesia mulai aktif terlibat ke dalam perfilman Indonesia dengan memberikan izin produksi, distribusi, dan juga ekspor, serta impor.

Pada tahun 1970-1990, film dianggap sebagai media yang berbahaya bagi stabilitas sosial. Kontrol terhadap film semakin ketat, apabila pejabat negara merasa tidak nyaman dengan isi dari film maka perlu dilakukan perubahan dan film tidak dapat ditayangkan. Izin produksi telah dipersulit, kebijakan sensor pun kembali berlaku. Pejabat negara dapat memotong gambar dan suara yang dianggap problematis secara politik dan moral. Era penyensoran besar-besaran ini membuat para pembuat film harus menyembunyikan agenda sosial mereka. Kemudian pada era globalisasi di awal tahun 1990, pemerintah terdorong untuk lebih terbuka pada produk luar negeri, menjadikan film-film Hollywood kembali masuk ke pasar

Indonesia. Dengan ini, produksi film lokal menurun hingga hampir nol. Perusahaan film besar fokus untuk membuat film untuk televisi. Pada akhir tahun 1999, beberapa pembuat film idealistik memutuskan untuk membangun industri lokal dari awal. Kemudian pada akhir tahun 2000-an perusahaan film besar kembali berjuang untuk mendapatkan slot film di bioskop (dalam Anggraini, Harjanthi, dan Imanda, 2021:11).

Pada perkembangannya, industri film di Indonesia telah mengikuti konteks sosial, politik, dan ekonomi. Industri film dikontrol isi dan penggunaannya, dijadikan subjek kebijakan yang dirancang dengan menyelipkan tujuan propaganda.

2.1.2. Perkembangan Industri Film di Jepang

Sejarah perfilman di Jepang dimulai ketika Edison Kinetoscope pertama kali ditampilkan di New York pada tahun 1894, Jepang yang senang dengan hal baru akhirnya mengimpor beberapa pada 1896, dua tahun setelah kinetoskop pertama. Cara kerja kinetoskop adalah dengan mengintip pada bagian atas alat dan memutar tuas, kemudian gambar akan bergerak melewati lensa. Namun popularitas kinetoskop tidak bertahan lama, pada 1897 Lumiere bersaudara membuat inovasi baru bernama Cinematographe Lumiere. Temuan ini diikuti oleh Edison Vitascope yang menawarkan tontonan menarik seperti “The Death of Mary Queen of Scots” dan “Feeding Pigeons”. Penemuan baru ini sangat populer di Jepang, karena mesin terbaru memproyeksikan gambar bergerak pada layar (Anderson dan Richie, 1982:21). Penemuan baru ini dianggap sangat besar, bahkan harga tinggi untuk

menonton film tidak mampu membuat khalayak yang tertarik untuk menonton berkurang.

Tidak seperti negara lain, gambar bergerak atau film pertama di Jepang bukan sebuah teater orang yang tidak mampu, melainkan teater orang-orang kaya yang tertarik dengan dunia barat. Para audiens mendapatkan lebih dari apa yang mereka keluarkan untuk menonton di teater. Pada delapan tahun pertama, beberapa instalasi bersikeras bahwa untuk menjalankan proyektor film memerlukan setidaknya 10 kru. Pada awal sejarah perfilman di Jepang juga terdapat peran yang sangat penting dalam perjalanan film, yaitu Benshi. Benshi hadir untuk menjelaskan kepada penonton mengenai film yang akan mereka tonton, juga menjelaskan apa yang terjadi dalam film ketika film diputar. Masyarakat Jepang merasa takut apabila tidak dapat paham dan pada akhirnya meminta penjelasan yang mendalam kepada Benshi.

2.1.3. Kapitalisasi Industri Film di Indonesia

Film mampu menjangkau populasi dengan jumlah yang besar dan juga dengan cepat, ini menjadikan film hampir menjadi media massa yang sebenarnya. Sebagai media massa, film merupakan bagian dari respons terhadap penemuan waktu luang, waktu libur dari kerja, dan jawaban dari tuntutan untuk menghabiskan waktu luang yang bersifat terjangkau. Kebutuhan individu yang terpenuhi adalah hal yang paling penting. Terdapat tiga elemen penting dalam sejarah film, yaitu penggunaan film sebagai propaganda, kemunculan beberapa sekolah seni film, dan munculnya gerakan film dokumenter (McQuail, 2011;35). Hingga kini pun masih dapat ditemukan elemen propaganda yang terlihat dalam film hiburan populer. Media

komunikasi massa juga aktivitasnya tidak dapat dipisahkan dengan bidang ekonomi ataupun politik. Film yang awalnya merupakan wujud respons atas waktu luang, untuk mengedukasi dan menginspirasi, kini dapat dijadikan alat untuk bisnis. Kapitalisme menyeret industri film ke dalam bisnis untung dan rugi.

Industri layar di Indonesia, yang mencakup televisi dan film, telah mengalami berbagai gelombang perubahan teknologi. Sejak film pertama Indonesia dirilis pada 1920-an, kemajuan teknologi telah membuka peluang baru di setiap tahap rantai nilai. Hal ini memicu revolusi dalam media dan pasar, sekaligus meningkatkan jumlah, kualitas, dan efisiensi biaya dalam ekspresi artistik di layar. Perkembangan internet dan munculnya *Online Curated Content* (OCC), yakni berbagai konten audio-visual yang disajikan secara daring melalui *streaming* atau platform media, menjadi salah satu bukti dari transformasi tersebut. Dilansir melalui Laporan Dampak Ekonomi Industri Layar Indonesia yang ditulis oleh PricewaterhouseCoopers Indonesia (PwC) pada tahun 2022, pelaku utama dalam industri layar umumnya berfokus pada investasi yang mendatangkan keuntungan, peningkatan kapasitas produksi, serta menjalin kemitraan distribusi guna mengoptimalkan potensi yang ada di industri tersebut.

2.1.4. Kapitalisasi Industri Film di Jepang

Berbeda dengan negara Barat, sejarah mengenai kapitalisme dan industri film di Jepang memiliki masa yang sama panjangnya. Kesenambungan yang dimiliki antar dua sejarah ini tidak kemudian membuat keduanya mudah untuk dianalisis. Kapitalisme di Jepang berbeda dengan kapitalisme di Barat, namun memiliki aturan

dasar yang sama. Begitupun dengan film Jepang berbeda dengan film Barat, namun keduanya menggunakan material yang sama.

Jepang berkembang dari masyarakat modern awal menjadi masyarakat modern, yang didominasi oleh budaya visual, tidak lagi oleh budaya tertulis maupun mulut ke mulut. Proses ini kemudian membuka kemungkinan baru mengenai subjek dan negara modern yang mulai disadari sejak masa Meiji. Berkembangnya Jepang menjadi negara modern tidak dapat dipisahkan dengan kemunculan dari kapitalisme Jepang. Kapitalisme meminta adanya persyaratan dengan segala yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kapitalisme memerlukan tipe “*modern self*” atau pribadi modern, yang mana film adalah sebuah instrumen atau alat yang dapat mewujudkannya. Munculnya film bersamaan dengan perkembangan kapitalisme membuat individu perlu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Jepang dan melayani pembagian kerja yang terspesialisasi, pada waktu yang sama, produksi kapitalis membatasi individu dengan adanya kategori baru, seperti perubahan komoditas, kontrak modern, hubungan manajemen dengan buruh, dan sejenis lainnya (Cazdyn, 2002:18).

Film menjadi media untuk mempelajari berbagai masalah dan perubahan yang terjadi. Film tidak hanya mencerminkan dan menjelaskan, tetapi juga ikut serta dalam membentuk perubahan tersebut. Selain itu, film digunakan untuk mengkaji konsep transformasi yang merupakan konsep yang agak rumit, namun sangat penting untuk dipahami ulang terutama ketika sistem global sedang berubah secara ekonomi dan budaya. Dalam konteks globalisasi, muncul perbedaan pandangan; ada yang berpendapat bahwa tatanan dunia baru akan menghilangkan

kesulitan pekerja dan menyebarkan budaya global yang demokratis, sementara yang lain mengkritik perusahaan transnasional yang berkuasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Konsep transformasi menjadi kunci penting untuk memahami Jepang dan dunia saat ini. Hubungan film Jepang dengan situasi global sebaiknya dipahami dalam konteks perubahan sebelumnya dan teori tentang transformasi itu sendiri (Cazdyn, 2002:28).

Anderson dan Richie dalam *The Japanese Film: Art and Industry* (1959;427) mengatakan bahwa dorongan untuk produksi massal tampaknya menyebabkan penurunan pada kualitas produksi film, meskipun kondisi finansialnya tetap stabil. Keberhasilan finansial yang dinikmati industri ini dibayar mahal dengan semakin berkurangnya kreativitas. Daya jual komersial yang lebih diutamakan dibandingkan eksplorasi kreativitas merupakan wujud kapitalisme dalam industri film di Jepang. Akibatnya, banyak film yang dibuat hanya untuk memenuhi permintaan pasar, disesuaikan agar menarik bagi audiens tertentu. Film Jepang memiliki pasar yang besar di luar negeri. Termasuk di dalamnya anime populer yang diadaptasi menjadi film layar lebar. Ekspor film memiliki kontribusi yang besar pada kapitalisasi industri film Jepang secara global. Distribusi global film Jepang melalui Netflix juga merupakan sebuah bentuk kapitalisasi film. Bagaimana Netflix menjangkau audiensnya secara luas mendunia, menciptakan nilai ekonomi dan pasar film semakin meluas.

2.2. Perkembangan Feminisme

2.2.1. Perkembangan Feminisme di Indonesia

Feminisme di Indonesia berkembang melalui beberapa fase penting yang berhubungan dengan perjuangan untuk kesetaraan gender. Dalam sejarahnya, perjuangan perempuan Indonesia dimulai dari masa kolonial, di mana perempuan mulai menyadari ketidaksetaraan yang mereka alami dan berjuang untuk hak-haknya. Gerakan feminisme ini mendapat dorongan dengan munculnya pendidikan yang lebih baik bagi perempuan, yang memunculkan kesadaran akan ketidakadilan sosial dan gender yang ada pada waktu itu. Pada awal abad ke-20, perjuangan perempuan Indonesia untuk kesetaraan mendapat bentuk lebih terorganisir, dengan munculnya organisasi-organisasi perempuan seperti Perhimpunan Istri Indonesia. Selain itu, ada juga pengaruh dari perkembangan global, seperti pengaruh dari gerakan feminis internasional dan perubahan sosial yang terjadi di dunia Barat.

Di Indonesia, feminisme mulai berinteraksi dengan perjuangan kemerdekaan, di mana banyak perempuan ikut berperan aktif dalam gerakan ini, baik secara langsung maupun melalui kontribusi mereka dalam hal sosial dan politik. Setelah kemerdekaan, meskipun perempuan Indonesia memperoleh hak suara dan kesempatan lebih banyak, masih ada banyak tantangan terkait kesetaraan gender dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan. Feminisme Indonesia kemudian berkembang lebih lanjut dengan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu spesifik perempuan, seperti kekerasan domestik dan hak-hak reproduksi. Gerakan ini semakin mendapatkan momentum pada tahun 1990-an, ketika isu-isu feminisme mulai didorong dalam berbagai forum

internasional dan lebih diakui oleh masyarakat Indonesia. Kesetaraan gender menjadi fokus utama dari gerakan feminisme di Indonesia, yang terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan perubahan sosial yang lebih inklusif.

Di tahun 2006, feminis menolak adanya RUU Pornografi karena dianggap akan membatasi kebebasan berekspresi dari kelompok minoritas. Mereka melakukan aksi demonstrasi yang diikuti oleh 6.000 orang, namun hal ini tidak dapat menghentikan disahkannya RUU Pornografi tersebut. Meskipun demikian, aksi demonstrasi ini mengirimkan pesan yang tegas untuk menentang fundamentalisme serta mendukung kebebasan berekspresi, kesetaraan hak, dan keberagaman dalam masyarakat. Era Reformasi mendorong dibentuknya Komnas Perempuan yang memiliki haluan feminis. Komisi ini didirikan untuk menguatkan hak asasi perempuan (Arifia dan Subono, 2017:7-20).

2.2.1.1. Gerakan Feminis Masa Kini di Indonesia

Perjuangan feminisme masa kini di Indonesia salah satu yang terbesarnya adalah melawan patriarki yang telah tertanam. Ketidakadilan atas perempuan, yang dirasa tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Kaum feminis di Indonesia tentunya menuntut keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, agar memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Namun pada saat ini, ketidakadilan tersebut sudah mulai luntur. Kini kita dapat melihat mulai banyaknya perempuan yang bekerja pada bidang yang lebih luas. Kita dapat melihat perempuan bekerja pada pekerjaan yang dulu mayoritasnya dikerjakan oleh laki-laki. Gerakan feminisme telah mendunia tanpa ada batasan, ini ditandai dengan adanya Hari Perempuan

Internasional, bahkan di beberapa negara Hari Perempuan Internasional diperingati dengan aksi Women's March.

Gerakan feminisme di Indonesia semakin pesat berkembang, capaian yang berhasil didapatkan dari perjuangan para feminis semakin besar, begitupun dengan tantangan yang harus dihadapi oleh para feminis di Indonesia. Masifnya pencapaian gerakan feminisme di Indonesia bisa dilihat melalui penentuan kebijakan, seperti UU No. 10 Tahun 2008 mengenai kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% bagi partai politik yang ingin mengikuti pemilu, dan pengesahan RUU TPKS yang banyak melewati perjuangan untuk berhasil diloloskan pengesahannya. Dengan masifnya pergerakan media sosial, perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan hak semakin mudah digaungkan. Namun, tidak sedikit juga yang melabeli feminis sebagai bentuk cacian. Di media sosial, akan dengan mudah ditemukan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan feminis, memberikan ujaran kebencian kepada para feminis yang sedang melebarkan pemahaman kesetaraan yang mereka ingin dapatkan. Ini menunjukkan bahwa pemikiran misoginis masih tertanam di dalam masyarakat, di tengah gempuran gerakan feminisme yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak dan kesetaraan yang sama dengan laki-laki (Lavenia, 2022, 10 Maret).

2.2.2. Perkembangan Feminisme di Jepang

Pada tahun 1970-an, di Jepang terdapat sekelompok perempuan yang menyebut diri mereka sebagai 'Tatakau Onnatachi', yang artinya adalah "Perempuan yang Melawan". Kelompok Tatakau Onnatachi ini adalah bagian dari gerakan perempuan liberalis yang kecewa terhadap seksisme yang dilakukan oleh laki-laki,

dan mereka waspada atas ancaman terhadap otonomi tubuh mereka (Mackie, 2003:1). Sejarah feminisme di Jepang dapat ditarik mundur hingga tahun 1868, saat Restorasi Meiji. Ketika itu, Kaisar Meiji melakukan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat yang menjadi era baru bagi Jepang. Namun dari berbagai aspek perubahan yang dilakukan saat Restorasi Meiji, perubahan pada bidang kesetaraan gender tidak mencapai harapan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan pengaruh rezim sebelum Restorasi Meiji yang masih melekat, sehingga untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki bukan sebuah hal yang mudah.

Pada tahun 1874, diskusi mengenai isu perempuan menjadi perhatian publik di Jepang. Argumen saling dilontarkan dan berkontradiksi, debat yang terjadi semakin membesar dengan adanya penulisan di surat kabar dan terkadang kurang mendalami permasalahan yang penting. Namun, perempuan Jepang mengatakan bahwa mereka membaca dan mendengarkan debat mengenai isu perempuan dengan ketertarikan yang besar. Salah satu kelompok penting yang ikut terlibat dalam debat isu perempuan ini adalah Meirokusha, yaitu sebuah wadah untuk para membernya merempresentasikan spektrum luas atas pengalaman dan opini mereka, kadang juga disebut intelektual klasik Meiji (Sievers, 1983:16). Mori Arinori, Fukuzawa Yukichi, dan Nakamura Masanao adalah anggota dari Meirokusha yang kerap memberikan kontribusi dalam jurnal Meirokusha. Mereka setuju bahwa perempuan Jepang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Jika Jepang menginginkan adanya reformasi yang sebenarnya dalam masyarakat Jepang, maka perlu dimulai dalam

keluarga dan perempuan harus menjadi pusat dari perubahan reformasi (Sievers, 1983;18).

Pada April 1986, Biro Wanita dari Kementrian Ketenagakerjaan Jepang berhasil membuat rancangan undang-undang pertama mengenai kesetaraan gender yang mayoritas dibangun oleh perempuan Jepang. Proses pembuatan keputusan atas Equal Employmen Opportunity Law (EEO) dianggap sebagai salah satu keputusan tersulit dalam sejarah politik Jepang. Hal ini dikarenakan rancangan undang-undang ini bertentangan tidak hanya dengan para pekerja laki-laki dan politik elit, namun juga bertentangan dengan para perempuan Jepang yang konservatif (Kobayashi, 2004;1).

2.2.2.1. Gerakan Feminis Masa Kini di Jepang

Kesetaraan gender kerap kali menjadi berita utama di Jepang. Seperti pada tahun 2020 silam, ketika Yoshiro Mori, Ketua Olimpiade Tokyo 2020 melontarkan pernyataan seksis terhadap perempuan. Yoshiro Mori yang merupakan mantan perdana menteri Jepang mengatakan bahwa perempuan terlalu banyak berbicara pada saat pertemuan Komite Olimpiade. Hal ini kemudian menjadi perbincangan yang ramai di kalangan masyarakat, terutama kaum perempuan yang merasa pernyataan Yoshiro Mori ini sebagai pelecehan terhadap perempuan. Atas pernyataannya ini, kemudian salah satu mahasiswa bernama Momoko Nojo membuat petisi untuk meminta pertanggungjawaban Ketua Olimpiade Tokyo tahun 2020. Petisi yang juga dipelopori oleh 10 perempuan lainnya berhasil mendapat dukungan dari 100.000 orang dalam waktu hanya 10 hari. Yoshiro Mori akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Olimpiade Tokyo.

Kesetaraan gender menjadi hal yang akan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar diterapkan di Jepang. Dilansir melalui [bbc.com](https://www.bbc.com), pemerintah Jepang hanya memperbanyak representasi perempuan dalam pemerintahan dan masyarakat dengan mematok target 30% perempuan mengisi posisi kepemimpinan di Jepang pada tahun 2020, namun kesetaraan gender belum mencapai harapan. Perempuan masih melakukan pekerjaan rumah 3,6 kali lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, Jepang hanya mendorong peningkatan jumlah pemimpin perempuan, tetapi tidak memberikan perubahan mendasar. Pada 2021 lalu, laporan Kesenjangan Gender Global yang dibuat oleh Forum Ekonomi Dunia menyatakan bahwa Jepang menduduki peringkat 120 dari 156 negara dalam hal kesetaraan gender. Pernyataan yang diucapkan Yoshiro Mori pada 2020 silam menjadi salah satu contoh bahwa publik Jepang masih memegang tinggi etika masyarakat karena tidak menggugat Yoshiro Mori. Jepang adalah negara dengan warga yang merasa sulit untuk berbicara dengan lawan bicara tanpa memandang usia maupun jenis kelamin, ujar Nojo, mahasiswa yang menuntut pertanggungjawaban Yoshiro Mori. Untuk mendapatkan kesetaraan gender, Jepang perlu untuk memperbanyak keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Jika dibandingkan dengan masa awal feminisme dimulai di Jepang, saat ini sudah semakin banyak perempuan yang merasa perlu untuk berdiri atas dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Bahkan perempuan-perempuan lanjut usia yang ikut mendukung petisi dari Momoko Nojo, mereka merasa bersalah karena tidak dapat bersuara sejak dahulu untuk melakukan perubahan.